KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

KPKNL SINGKAWANG

2024

Jalan Alianyang Nomor 02, Singkawang
djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang
kpknlsingkawang@kemenkeu.go.id
(0562) 634803

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang sebagai salah satu Instansi Vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah Kalimantan Barat, telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024. LAKIN merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Singkawang selama tahun 2024. Penyusunan LAKIN KPKNL Singkawang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-4705/KN.1/2024 tanggal 15 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024.

LAKIN mempunyai beberapa fungsi, yakni merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya good *governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja KPKNL Singkawang.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Singkawang telah menerapkan *sistem Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Singkawang dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Singkawang dengan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat Nomor PK-02/KN.23/2024 tanggal 31 Januari 2024. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam LAKIN tahun 2024 didasarkan pada hasil capaian kinerja IKU yang berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Kemenkeu-*Three* KPKNL Singkawang Tahun 2024 sebesar 111,45%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Singkawang sesuai dengan Peta Strategi

KPKNL Singkawang Tahun 2024.

Kami berharap agar penyusunan LAKIN tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Singkawang. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan pelayanan secara terus-menerus yang dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat dilaksanakan sesuai harapan *stakeholder*.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Singkawang yang telah berusaha menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian sasaran program/kegiatan strategis pada Kontrak Kinerja Tahun 2024 ini, kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2024.

Kepala KPKNL Singkawang

Ditandatangani secara elektronik
Andri Dwinanto
NIP 197511131996021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. TUGAS DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN KOMPOSISI PEGAWAI ... 1
1. Tugas dan Fungsi 1
2. Struktur Organisasi 2
3. Komposisi Pegawai 4
4. Wilayah Kerja 5
B. PERAN STRATEGIS KPKNL 6
C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*) 8
D. SISTEMATIKA LAPORAN 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA **11**
A. RENCANA STRATEGIS 11
B. PENETAPAN/PERJANJIAN KERJA 16
C. ADENDUM KONTRAK KINERJA 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **20**
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 20
1. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian 24
a. Indeks Integritas 24
b. Indikator Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 25
2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa 28
a. Indikator Tingkat Kesesuaian Pengunaan BMN dengan SBSK 28
b. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara 29
3. Sasaran strategis ketiga yaitu Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal 30
a. Persentase Realisasi Pokok lelang 30
b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara 32
4. Sasaran strategis keempat yaitu Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien 33

5. Sasaran strategis kelima yaitu Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara Yang Efektif....34
a. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan dengan Realisasi 34
b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 35
c. Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle 36
6. Sasaran strategis keenam yaitu Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif....38
a. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara 38
b. PersentaseProduktivitas Lelang 39
7. Sasaran strategis ketujuh yaitu Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel Dan Profesional....40
8. Sasaran strategis kedelapan yaitu Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaktif....41
a. Pengembangan Kompetensi Pegawai 41
b. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko 42
9. Sasaran strategis kesembilan yaitu Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel 43
a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 43
b. Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN 44
10.Sasaran strategis kesepuluh yaitu Komunikasi Publik Yang Efektif 45
11. Sasaran strategis kesebelas yaitu Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah 46
B. KINERJA LAINNYA 46
C. REALISASI ANGGARAN 51
BAB IV PENUTUP....53

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang tahun 2024, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil *(outcome)*. LAKIN KPKNL Singkawang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

LAKIN mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, LAKIN juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya di KPKNL Singkawang.

Sebagai salah satu instansi vertikal dan unit operasional di lingkungan DJKN, KPKNL Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Singkawang menyelenggarakan fungsi: (1) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; (2) Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; (3) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; (4) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara; (5) Pelaksanaan pelayanan penilaian; (6) Pelaksanaan pelayanan lelang; (7) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; (8) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang; (9) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; (10) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Singkawang instansi vertical Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), mengadopsi visi DJKN, yaitu "**Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.

4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Singkawang adalah:

(1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
(2) Peningkatan pelayanan penilaian;
(3) Optimalisasi pengurusan Piutang Negara;
(4) Peningkatan pelayanan lelang;
(5) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasikan untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL tahun 2024, telah ditetapkan sasaran strategis:

a. Satu sasaran merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
b. Tiga sasaran merupakan bagian dari *Customer Perspective*, yaitu (1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa, (2) Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal, dan (3) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;
c. Tiga sasaran merupakan bagian dari *Internal Process Perspectiv*e, yaitu (1) Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif, (2) Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif, dan (3) Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional;
d. Empat sasaran merupakan bagian dari *Learning & Growth Perspective*, yaitu (1) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, (2) Pengelolaan keuangan yang akuntabel, (3) Komunikasi publik yang efektif, dan (4) Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

Sasaran strategis pertama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, dengan capaian 101,93%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Indeks Integritas dengan realisasi capaian sebesar 92,44 dari target 89,17, dan (2) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP) dengan realisasi 100,19% dari target 100%.

Sasaran strategis kedua yaitu Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa, dengan capaian 120%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Tingkat Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dengan realisasi 87,04% dari target 71,5%, dan (2) Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN dengan realisasi 119% dari target 86,5%.

Sasaran strategis ketiga yaitu Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal dengan capaian 89,34%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Persentase realisasi pokok lelang dengan realisasi sebesar 61,16% dari target 100%, dan (2) Persentase penurunan outstanding piutang negara dengan realisasi sebesar 120% dari target 100%.

Sasaran strategis keempat yaitu Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien dengan capaian 120%. Capaian terseut diperoleh dari 1 (satu) IKU yaitu, Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian dengan realisasi 100 dari target 75.

Sasaran strategis kelima yaitu Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif, dengan capaian 113,33%. Capaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) IKU, yaitu (1) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan dengan realisasi sebesar 120,00% dari target 100%, (2) Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) dengan realisasi sebesar 120,00% dari target 100%, dan (3) Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle dengan realisasi sebesar 100 dari target 100.

Sasaran strategis keenam yaitu Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif, dengan capaian 114,43%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU yaitu, (1) Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara dengan realisasi sebesar 64,71% dari target 71% (target *minimize*/semakin kecil realisasi memiliki tingkat capaian lebih besar); dan (2) Persentase produktivitas lelang dengan realisasi sebesar 120% dari target 89%.

Sasaran strategis ketujuh yaitu Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional dengan capaian 120%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan realisasi sebesar 0% dari target 16% (target *minimize*/semakin kecil realisasi memiliki tingkat capaian lebih besar).

Sasaran strategis kedelapan yaitu Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif dengan capaian 117,94%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Persentase

pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi sebesar akhir 120% dari target 90%, dan (2) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko dengan realisasi 98,5 dari target 85.

Sasaran strategis kesembilan yaitu Pengelolaan keuangan yang akuntabel, dengan capaian 120%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dengan indeks realisasi sebesar 120 dari target 100, dan (2) Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN dengan indeks capaian 0 dari target 10 (target *minimize*/semakin kecil realisasi memiliki tingkat capaian lebih besar).

Sasaran strategis kesepuluh yaitu Komunikasi publik yang efektif dengan capaian 120%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) dengan indeks realisasi sebesar 100 dari target 80.

Sasaran strategis kesebelas yaitu Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah dengan capaian 119,68%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Indeks efektivitas UKI dengan indeks realisasi sebesar 98,14 dari target 82.

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN KOMPOSISI PEGAWAI

1. Tugas dan Fungsi

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.01/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam struktur organisasinya, KPKNL Singkawang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;

j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

2. Struktur Organisasi

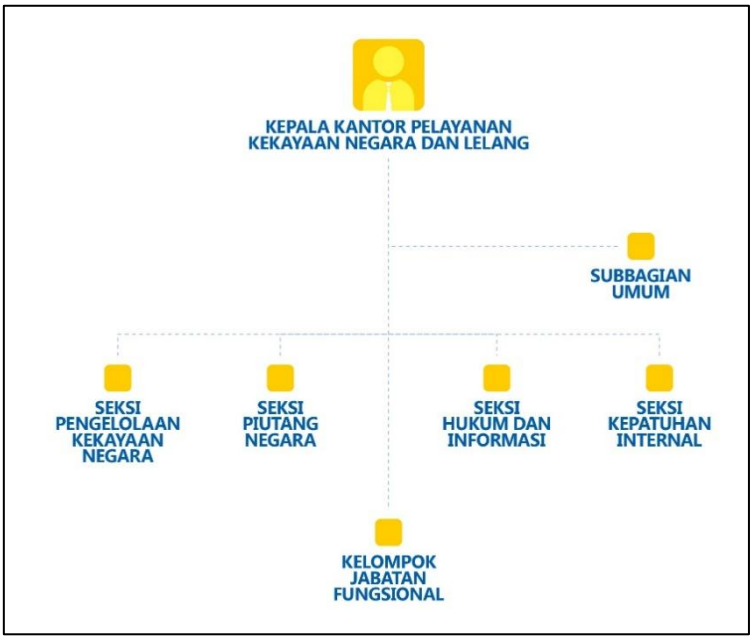

Gambar 1. Struktur Organisasi KPKNL

KPKNL Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor (Pejabat Eselon III), 4 (empat) Kepala Seksi, 1 (satu) Kepala Subbagian (Pejabat Eselon IV), dan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional (Pelelang dan Penilai) serta pelaksana yang memiliki tugas sebagai berikut:

a. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis kerja, keuangan, tata usaha, rumah beban tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar Barang Milik Negara/kekayaan negara.

c. Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

d. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

e. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, penyelesaian pengaduan masyarakat dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepadaPejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II, Pejabat Administrator atau Pejabat Eselon III, atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

3. Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Singkawang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 19 (sembilan belas) orang pegawai, sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pegawai KPKNL Singkawang Tahun 2024

Jabatan	Nama	Pangkat/Gol	Pendidikan
Kepala KPKNL			
Kepala KPKNL	Andri Dwinanto	Pembina/ IV.a	S2
Sub Bagian Umum			
Kasubag Umum	Adi Friandi	Penata Tk.I / III.d	S1
Bendahara Pengeluaran	Riski Nur Afifah	Pengatur / II.c	D3
Pelaksana	Cahyanto Kabisatriyo	Penata Muda / III.a	S1
Pelaksana	Yosi Roshadi Putri	Pengatur / II.c	D3
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara			
Kepala Seksi	Sigit Hartono	Penata Tk.I/III.d	S1
Pelaksana	Hendrayani	Penata Muda Tk.I/III.b	SLTA
Pelaksana	Ahmad Taufiq Ramadlan	Penata Muda / III.a	S1
Pelaksana	Jennifer Evaulina	Pengatur Tk.I / II.d	D3
Seksi Piutang Negara			
Kepala Seksi	Thaus Sugihilmi Arya Putra	Pembina / IV.a	S2
Pelaksana	Iwan Zuardi (Pensiun per-01 November 2024)	Penata Muda Tk. I / III.b	SLTA
Seksi Hukum dan Informasi			
Kepala Seksi	Iga Trisna Nurma Sari	Penata / III.c	S2
Bendahara Penerimaan	Diajeng Kayana Puspamaya	Pengatur / II.c	D3
Pelaksana	Nita Kurnia Syahasiah	Pengatur / II.c	D3
Seksi Kepatuhan Internal			
Kepala Seksi	Andri Dian Prastyawan	Penata / III.c	S1
Pelaksana	Refrelkeae "El" Faesalre	Penata Muda Tk. I /III.b	S1
Kelompok Jabatan Fungsional			
Fungsional Pelelang	Fenti Andriyani	Penata Tingkat I / III.d	S1
Fungsional Pelelang	Deta Krisnandy	Penata Muda Tk.I / III.b	S1
Fungsional Penilai	Haidar Budi Ismail	Penata /III.c	S2
Fungsional Penilai	Wahyu Karyadi	Penata Muda/III.a	S1

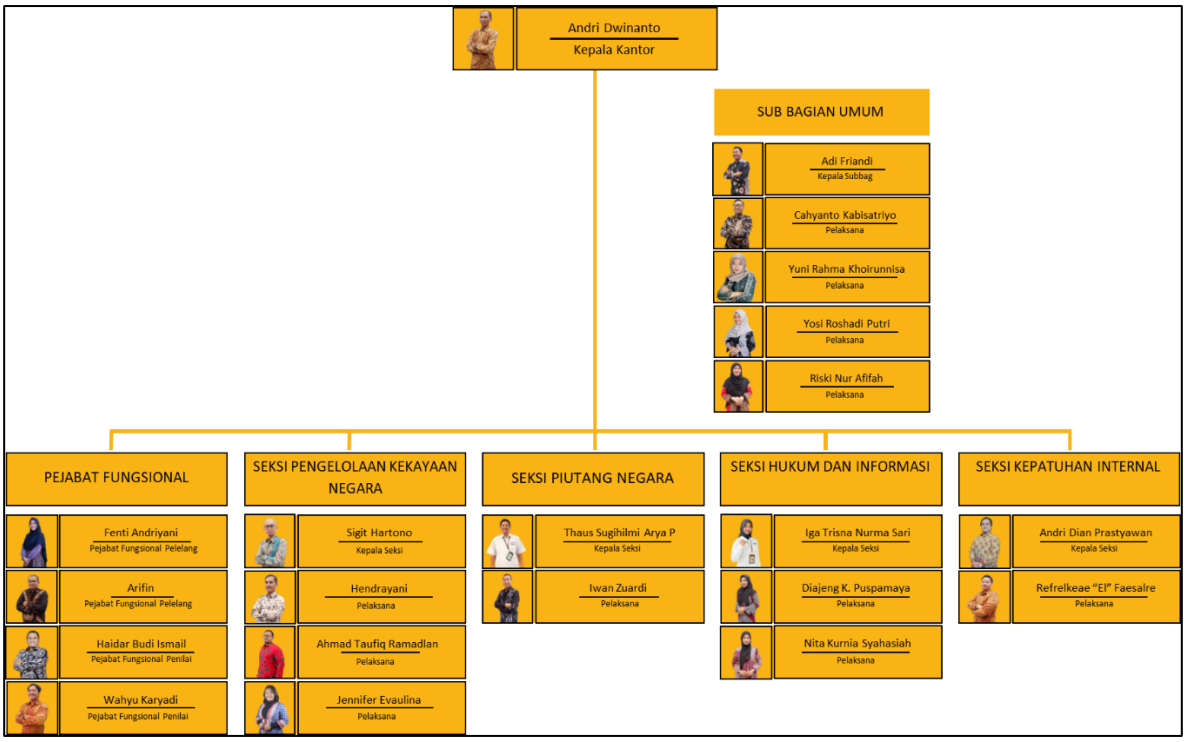

Gambar 2. Struktur Organisasi KPKNL Singkawang

4. Wilayah Kerja

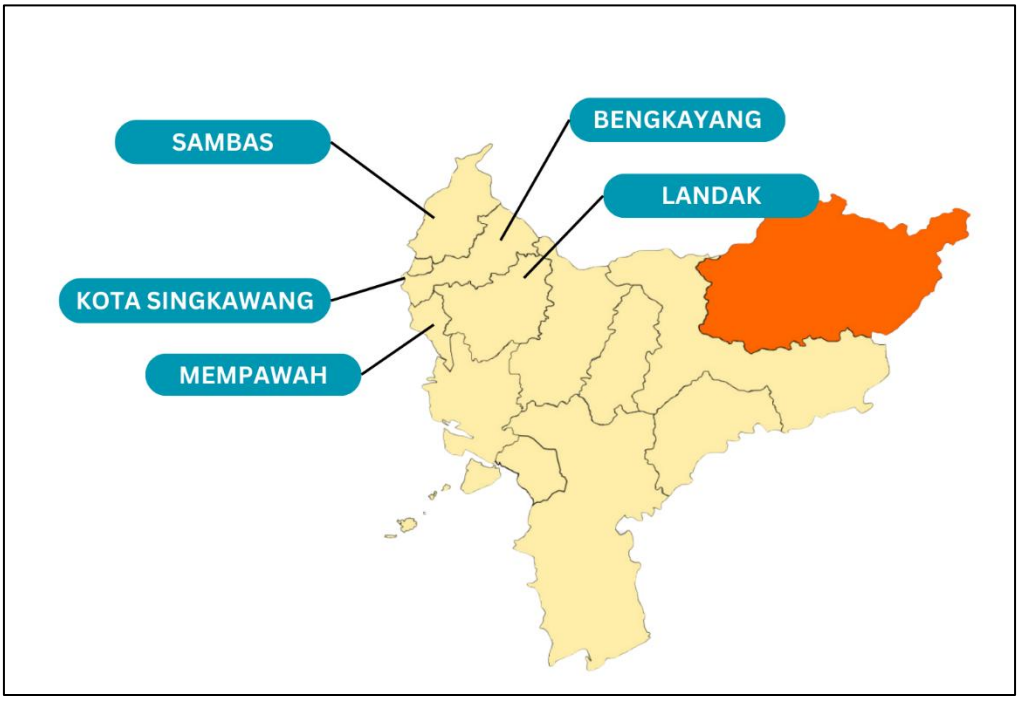

Gambar 3. Wilayah Kerja KPKNL Singkawang

KPKNL Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan wilayah kerja yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Singkawang bertambah dari tiga menjadi lima wilayah kerja yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Landak.

B. PERAN STRATEGIS KPKNL

Sebagai salah satu instansi vertikal DJKN yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memiliki peran strategis, sebagai berikut:

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

   Peran strategis KPKNL di bidang pengelolaankekayaan negara sebagai berikut:

   a. Barang Milik Negara

      Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager* di wilayah kerjanya, KPKNL mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

   b. Penilaian Aset

      Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Seiring dengan restrukturisasi DJKN dan selesainya program penertiban BMN, penilaian dilakukan terutama terhadap penyelesaian atau tindak lanjut temuan BPK dan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu penilaian dalam

rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Selain BMN, Penilai DJKN juga melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN seperti dalam rangka tukar-menukar BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah, Kekayaan Negara Lain-lain seperti aktiva tetap BUMN.

2. Memberikan Pelayanan Pengelolaan dan Pengurusan Piutang Negara

   Peran strategis KPKNL Singkawang di bidang pengelolaan dan pengurusan piutang negara adalah dalam rangka memperbaiki pengelolaan piutang negara untuk mewujudkan laporan keuangan instansi/pemerintah pusat yang lebih akuntabel. Adapun terkait pengurusan piutang negara, KPKNL Singkawang berperan dalam menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan (NPL)* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah yang timbul berdasarkan berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

   Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL secara terus-menerus mengupayakan penggalian potensi lelang, baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat. Selain itu, lelang merupakan sarana dalam penegakan hukum (*law enforcement)* yang berasal dari putusan/penetapan pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan barang rampasan/sitaan/temuan/tegahan. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Singkawang diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

   KPKNL Singkawang dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Singkawang masih menghadapi beberapa permasalahan utama yang merupakan tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Beban kerja tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada. Hal ini dapat dilihat pada komposisi pegawai pada KPKNL Singkawang, yang hanya didukung sumber daya manusia sebanyak 20 pegawai dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari SLTA hingga Strata 2. Kondisi ini masih tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Singkawang.
2. Daya beli masyarakat dan minat terhadap barang yang dijual melalui lelang masih rendah.
3. Pengelolaan piutang negara yang masih belum maksimal dikarenakan hal-hal tertentu yaitu umur piutang yang dikelola KPKNL Singkawang yang sudah lama dan tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur yang tidak diketahui, dan itikad baik debitur untuk membayar hutang masih rendah.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Singkawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

   Bagian ini menguraikan secara singkat tentang visi dan misi DJKN yang harus dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang, tujuan, sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian dan kendala-kendala yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan,

   Bab ini menguraikan penjelasan umum organisasi seperti tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi dan komposisi pegawai KPKNL Singkawang. Selain itu juga ditekankan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi oleh KPKNL Singkawang, serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

   Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Singkawang tahun 2024 termasuk penjelasan tentang Addendum bila ada.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

   Bab ini terdiri dari tiga subbab yaitu Capaian Kinerja Organisasi, Kinerja Lainnya, dan Realisasi Anggaran.

   A. Capaian Kinerja Organisasi

      Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

      1) membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini
      2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
         a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
         b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
         c. target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024;
         d. standar nasional (jika ada);
      3) menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
      4) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
      5) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
      6) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
      7) analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja; dan
      8) rencana aksi ke depan.

B. Kinerja Lainnya

1) Penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan yang diterima unit dari institusi/Lembaga luar KPKNL Singkawang selama tahun 2024.
2) *Achievement* yang dimaksud adalah capaian/inovasi yang diraih unit selama tahun 2024.
3) Replikasi yang dimaksud adalah penduplikasian sistem kinerja/proses bisnis oleh instansi lain diluar unit selama tahun 2024 dan dapat dibuktikan dengan dokumen replikasi serta *benchmarking* oleh K/L lain dengan tujuan menjadikan unit sebagai salah satu referensi dalam perbaikan proses bisnis maupun organisasi K/L dimaksud.
4) Menyampaikan narasi tentang parameter *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Singkawang serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPKNL Singkawang untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana Strategis DJKN telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis KPKNL memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. KPKNL berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat"**. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas. Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan ke dalam frasa sebagai berikut.

1. Pengelola kekayaan negara adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.
2. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui:
    a. optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang;

b. peningkatan pembiayaan dalam negeri; serta
c. integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Singkawang menetapkan misi, yang terdiri dari:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL untuk periode 2020-2024 adalah adalah (1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Peningkatan pelayanan penilaian; (3) Optimalisasi pengurusan piutang Negara; (4) Peningkatan pelayanan lelang; (5) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

KPKNL dalam mencapai tujuan tersebut, telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024. KPKNL Singkawang dalam mencapai tujuan tersebut telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
   a. pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
   b. pengamanan kekayaan negara yang akuntabel; dan
   c. pengawasan dan pengendalian yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan piutang Negara adalah:
   a. pengurusan piutang negara yang optimal; dan
   b. PNBP dari pengukuran piutang negara yang optimal.

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan piutang Negara adalah:
    a. pelayanan lelang yang optimal; dan
    b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
    a. organisasi yang *fit for purpose*;
    b. SDM yang kompetitif; dan
    c. sistem informasi manajemen yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang selaku unit pelaksana DJKN. Strategi tersebut harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Singkawang yang akan dilaksanakan adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
    a. Penyempurnaan dan penguatan di bidang pengelolaan BMN
        1) Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.
        2) Memberikan regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.
    b. Implementasi basis akrual dan peningkatan kualitas penyajian Nilai BMN
       Digitalisasi pengelolaan BMN dalam rangka menyajikan nilai BMN yang akurat menggunakan aplikasi SIMAN. SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset negara yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
    c. Pengawasan, pengendalian BMN secara efektif dan peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN
    d. Percepatan Sertifikasi BMN
        1) Peningkatan kualitas data yang tersaji dalam Master Aset aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara).
        2) Pembuatan Nota Kesepahaman antara DJKN, Badan Pertanahan Nasional dan K/L terkait program sertifikasi BMN.
2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

b. Melakukan kegiatan *Knowledge Sharing*, diskusi berkala, dan *In House Training* di bidang penilaian.
c. Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan *peer review* laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
d. Melakukan survei data harga jual dan harga sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran di setiap kecamatan di seluruh wilayah kerja KPKNL Singkawang. Menginput *database* penilaian menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) sebagai aplikasi yang membantu kegiatan penilaian.
e. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.

3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:
   a. Melakukan kegiatan penggalian potensi piutang negara/daerah.
   b. Melakukan kegiatan penggalian potensi piutang *channeling* dan *risk sharing* dari BUMN/D dan lembaga non perbankan.
   c. Mengintensifkan penagihan secara langsung (*door to door*) kepada debitur.
   d. Menerbitkan pengumuman panggilan kepada debitur untuk menyelesaikan hutang.
   e. Melakukan pemetaan terhadap Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN yang potensial.
   f. Melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan lain debitur.
   g. Mengintensifkan hubungan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
   h. Melakukan edukasi terkait pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah.
4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang yang optimal antara lain:
   a. Meningkatkan pelayanan administrasi lelang

      Peningkatan pelayanan administrasi lelang sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan kepada pengguna jasa lelang dilakukan dengan cara:
      1) Mengadministrasikan kegiatan sebelum lelang dan sesudah lelang dengan menerapkan prosedur lelang sesuai *Standard Operation Procedure* (SOP) secara ketat.
      2) Meningkatkan kemampuan para pegawai yang secara langsung melaksanakan lelang dan instruktur jaminan lelang dengan cara mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh DJKN yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
      3) Membuat *database* minuta risalah lelang.

4) Mengadakan brosur-brosur dan pamflet yang berkaitan dengan pelayanan lelang.
5) Sosialisasi aplikasi lelang v.2 sebagai bagian pelaksanaan *e-auction* kepada *stakeholders*.
6) Menambah jumlah pejabat lelang aktif di KPKNL Singkawang

b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal

1) Peningkatan frekuensi lelang

Peningkatan frekuensi lelang sebagai upaya untuk meningkatkan PNBP maka intensitas pelaksanaan lelang harus terus ditingkatkan melalui *e-auction* baik secara penawaran terbuka (*open bidding*) maupun penawaran tertutup (*closed bidding*). Jumlah frekuensi lelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini tidak lepas dari upaya adanya penggalian potensi lelang.

2) Menyebarkan informasi objek lelang

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan lelang perlu dilakukan strategi pemasaran yang baik, pemasaran berkaitan dengan informasi objek lelang. Oleh karena itu upaya ini perlu dilakukan baik oleh penjual maupun KPKNL. KPKNL Singkawang mengupayakan penyebaran informasi objek lelang baik secara lisan, selebaran pengumuman, maupun internet dan diharapkan semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap barang-barang yang akan dilelang.

5. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
   a. Peningkatan efektivitas tata kelola pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
   b. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
   c. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan kepada para *stakeholder*.
   d. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai dengan mengikuti seminar, diklat, dan *knowledge sharing*.
   e. Peningkatan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih responsif.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, KPKNL Singkawang membuat program untuk melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu Untuk melaksanakan strategi tersebut, KPKNL Singkawang

membuat program untuk melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL untuk mendapatkan suatu hasil. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL dapat dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu: (1) Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan; dan (2) Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara.

B. PENETAPAN/PERJANJIAN KERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara itu, dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL. Sasaran Strategis KPKNL Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL. Peta Strategi KPKNL tahun 2024 memuat 11 (sebelas) Sasaran Strategis.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Satu sasaran yang merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Tiga sasaran yang merupakan bagian dari *customers perspective*, yaitu:
    a. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
    b. Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal; dan

c. Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

3. Tiga sasaran yang merupakan bagian dari *internal process perspective*, yaitu:
   a. Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif;
   b. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif; dan
   c. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional.
4. Empat sasaran merupakan bagian dari *learning and growth perspective* yaitu:
   a. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
   b. Pengelolaan keuangan yang akuntabel;
   c. Komunikasi publik yang efektif; dan
   d. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

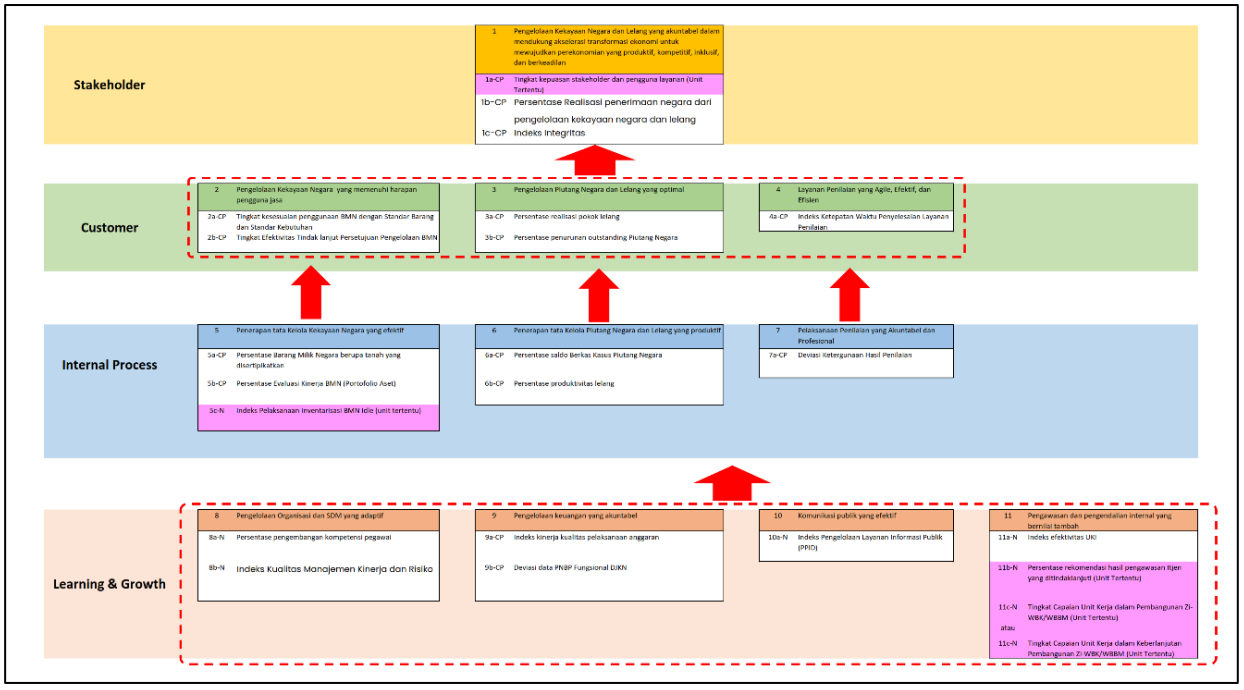

Gambar 4. Peta Strategis DJKN

Peta strategi DJKN mempunyai empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective, internal process perspective,* dan *learning and growth perspective*. Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2024 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL mencapai sebelas sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU yang berada di KPKNL Singkawang.

Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kontrak Kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2024

No	Uraian IKU	Target 2024
Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkeadilan		
1	Indeks Integritas	89,17
2	Presentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan KN Dan Lelang (PNBP)	100%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
4	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
Pengelolaan Piutang Dan Lelang yang Optimal		
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien		
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif		
8	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
10	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif		
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	71%
12	Persentase Produktivitas Lelang	89%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
13	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif		
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
15	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko	85
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel		
16	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
17	Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10
Komunikasi Publik yang Efektif		
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
Pengawasan Dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah		
19	Indeks Efektivitas UKI	82

C. ADENDUM KONTRAK KINERJA

Selama tahun 2024 tidak terdapat *addendum* kontrak kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* KPKNL Singkawang Tahun 2024, diperoleh hasil 18 (delapan belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan dan 1 (satu) IKU memperoleh hasil yang belum mencapai target. Dengan demikian, secara keseluruhan KPKNL Singkawang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) istimewa atau melebihi 100% dengan indikator hijau yaitu sebesar 111,45%.

Tabel 4. Capaian Kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2024

No	Uraian IKU	Target 2024
Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkeadilan		
1	Indeks Integritas	89,17
2	Presentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan KN Dan Lelang (PNBP)	100%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
4	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
Pengelolaan Piutang Dan Lelang yang Optimal		
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien		
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif		
8	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%

9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
10	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif		
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	71%
12	Persentase Produktivitas Lelang	89%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
13	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif		
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
15	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko	85
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel		
16	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
17	Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%
Komunikasi Publik yang Efektif		
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
Pengawasan Dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah		
19	Indeks Efektivitas UKI	82

No	Uraian IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks Max 120%
1	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%
2	Presentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan KN Dan Lelang (PNBP)	100%	100,19%	100,19%
3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	87,04%	120%
4	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	119%	120%
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	61,16%	61,16%
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	120%	120%
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	100	120%
8	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	120%	120%
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120%	120%
10	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100%	100%	100%
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	71%	64,71%	108,86%
12	Persentase Produktivitas Lelang	89%	120%	120%
13	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0%	120%
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	120%	120%
15	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko	85	98,5	115,88%

No	Uraian IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks Max 120%
16	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	120	120%
17	Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	0%	120%
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100	120%
19	Indeks Efektivitas UKI	82	98,14	119,68%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				111,45%

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja KPKNL Singkawang

No	Uraian IKU	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	144,54%	100%	49,79%	100%	116,49%	100%	85,65%	100%	100,19%
2	Persentase produktivitas lelang	34%	49,19%	35%	39,6%	36%	63,7%	80%	120,36%	89%	120%
3	Indeks Integritas							88,67	89,17	89,17	92,44
4	Persentase realisasi pokok lelang	100%	114,48%	100%	127%	100%	169,4%	100%	90,08%	100%	61,16%
5	Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2024)	3%	14,35%	100%	184%	100%	186,97%	100%	408,95%	100%	120%
6	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,63	4,9	4,7	4,91	4,71	4,92	4.72	4.93		
7	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	100%	102,88%	62%	83,87%	65%	85%	68%	83,25%	71,5%	87,04%

No	Uraian IKU	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan	100%	100%	100%	107,84 %	100%	110%	100%	219,44 %	100%	120%
9	Persentase Penyelesaian Berkas Piutang Negara (BKPN)	100%	155,41 %	100%	121,4 %	100%	200%	100%	101,04 %	71%	64,71%
10	Deviasi Ketergunaan hasil penilaian	30%	0%	22%	0%	19%	0%	25%	0%	16%	0%
11	Persentase pelaksanaan lelang online	90%	100%	92%	100%	92%	100%	90%	100%		
12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	100%	120,69 %	100%	122,2 %	100%	124%	47%	161,11 %	100%	120%
13	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	80%	100%	85%	100%	85%	100%	86%	100%	86,5%	119%
14	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	96,82 %	95,5 %	94,62 %	95,5 %	95,99 %	100%	111 %	100%	120%
15	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan					100%	117,65 %	100%	187%		
16	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN			12,5 %	0%	10%	0%	15%	0%	10%	0%
17	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif							60	96,3		
18	Indeks Capaian Unit Kinerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM							100	90		
19	Persentase pengembangan kompeten pegawai	100%	120%	100%	120%	100%	120%	100%	120%	90%	120%

No	Uraian IKU	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
20	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko							80	99,18	85	98,5
21	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian									75	100
22	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle									100	100
23	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)									80	100
24	Indeks Efektivitas UKI									82	98,14

Adapun rincian capaian kinerja atas sembilan belas IKU Kemenkeu-Three KPKNL Singkawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

a. Indeks Integritas

KPKNL Singkawang	1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target		20	20	20	20	89,17	89,17	MAX/TLK
Realisasi		20	20	20	20	92,44	92,44	
Capaian		100	100	100	100	103,67	103,67	
Nilai Kinerja		100	100	100	100	103,67	103,67	

Sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif pada suatu organisasi, diperlukan pelaksanaan penilaian integritas. Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insitusi dengan

mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian indeks integritas bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

Kriteria penilaian IKU Indeks Integritas yaitu merupakan gabungan hasil penilaian dari responden internal, responden eksternal, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), faktor koreksi dan adanya apresiasi yang diberikan. Adapun faktor koreksi ini mencakup keterjadian Operasi Tangkap Tangan (OTT/*fraud*), hasil audit investigasi, pengondisian, informasi Aparat Penegak Hukum. Adapun indikator apresiasi mencakup penilaian atas realisasi rencana aksi perbaikan dari Hasil SPI dan penilaian atas pencegahan di Unit Eselon I.

b. Indikator Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

KPKNL Singkawang	1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10% Rp519.081.000	30% Rp1.557.243.000	30% Rp1.557.243.000	60% Rp3.114.486.000	60% Rp3.114.486.000	100% Rp5.190.810.000	100% Rp5.190.810.000	MAX/ TLK
Realisasi	11,34% Rp588.408.046	34,63% Rp1.797.723.618	34,63% Rp1.797.723.618	61,68% Rp3.201.863.925	61,68% Rp3.201.863.925	100,19% Rp5.200.829.505	100,19% Rp5.200.829.505	
Capaian	113,4	115,43	115,43	102,8	102,8	100,19	100,19	
Nilai Kinerja	113,4	115,43	115,43	102,8	102,8	100,19	100,19	

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

1) PNBP Pengelolaan BMN

PNBP Aset adalah penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan dan penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan

Ditjen Perbendaharaan. Realisasi PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp3.957.287.565,00 dari target sebesar Rp2.500.000.000,00.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target yaitu bersurat kepada satker untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, emantau surat persetujuan sewa dan pemindahtangan yang telah dibuat untuk ditindaklanjuti, dan menghimbau satker untuk melakukan optimalisasi BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu satker belum *aware* untuk melakukan pemanfaatan BMN secara optimal. Adapun langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu bersurat kepada satker untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu bersurat ke satker K/L terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan *asset*, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan wasdal terkait pemindahtanganan dan pemanfaatan aset.

2) PNBP Piutang Negara adalah penerimaan dari Pengurusan Piutang Negara

Realisasi PNBP Piutang Negara sebesar Rp3.573.068,00 dari target sebesar Rp2.100.000,00. Hal yang dapat mendukung pencapaian target yaitu dengan melakukan penagihan langsung atau secara *door to door* dan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait data penyerahan untuk debitur harus jelas identitas dan alamat tinggalnya sehingga dapat dilakukan penagihan. Selain itu juga dengan cara penerbitan pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). untuk piutang yang memenuhi syarat. Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu umur piutang yang sudah lama serta tidak didukung barang jaminan dan keberadaan debitur tidak diketahui, ada penyerahan pengurusan piutang baru namun dengan nilai penyerahan kecil. Dokumen BKPN yang berasal dari eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak lengkap, dan debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar/melunasi utangnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang agar menyerahkan berkas kasus piutang negara yang telah macet dan melengkapinya dengan identitas dan data debitur yang jelas. Untuk piutang BLBI telah dilakukan konfirmasi ke Direktorat PKN. Selanjutnya melakukan penggalian potensi piutang negara/daerah.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu melakukan penagihan piutang negara dan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang serta menerbitkan PSBDT, menyampaikan pemberitahuan terkait sisa kewajiban penganggung utang, baik secara langsung maupun surat, serta berkoordinasi dan melakukan penggalian potensi piutang dengan satker K/L maupun pemerintah daerah.

3) PNBP Lelang

PNBP Lelang adalah penerimaan yang berasal dari bea lelang, bea lelang pegadaian, denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang, biaya permohonan lelang, penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi, dan penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp1.239.968.872 dari target yaitu sebesar Rp2.688.710.000,00. Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya realisasi tersebut yaitu para Pejabat Fungsional Pelelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku dan melakukan penggalian potensi lelang.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu barang yang dilelang tidak *marketable*, daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah, beberapa objek lelang masih berpenghuni, harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi, serta kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat atas pelaksanaan lelang.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang, penggalian potensi Lelang (terutama Lelang Non Eksekusi Sukarela/UMKM), dan menghimbau kepada pemohon lelang agar mengajukan permohonan lelang terhadap objek yang berpotensi laku.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam penggalian potensi lelang serta bersurat kepada pemohon lelang agar mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku, sosisalisasi tentang pelaksanaan lelang di sosial media KPKNL Singkawang, serta sosialisasi tentang alur prosedur dan pelaksanaan simulasi lelang pada kegiatan edukasi seperti kunjungan ke instansi pendidikan dan kegiatan lain yang melibatkan masyarakat selaku pengguna jasa.

Realisasi persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar Rp5.200.829.505 atau tercapai sebesar 100,19% dari total target. Realisasi berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pendapatan pengelolaan keyayaan negara (pengelolaan BMN), pendapatan dari biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara, dan pendapatan dari bea lelang, dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian Pendapatan	Penerimaan PNBP Tahun 2024
1	PNBP Pengelolaan BMN	Rp3.957.287.565
2	PNBP Piutang Negara	Rp3.573.068
3	PNBP Lelang	Rp1.239.968.872
Total		**Rp5.200.829.505**

2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. Indikator Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

KPKNL Singkawang	2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target		50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	MAX/ TLK
Realisasi		83,17%	83,17%	86,10%	86,10%	87,04%	87,04%	
Capaian		166,34	166,34	143,5	143,5	121,73	121,73	
Nilai Kinerja		120	120	120	120	120	120	

K-Wide	2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan				
T/R	Target 2024	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20
Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2022)	Bobot 75%		84,43%	85,64%	85,64%
Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021)	Bobot 25%		79,40%	89,10%	91,24%
Capaian			83,17%	86,10%	87,04%

Realisasi IKU Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 87,04%. IKU tersebut dihitung atas Total BMN pada

Satker yang Telah Selesai Pengukuran SBSK-nya atas target BMN yang ditetapkan. Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk exsisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu bersurat kepada satker untuk menyampaikan target SBSK tahun 2024 agar satker dapat menyiapkan data perhitungan SBSK, serta penyampaian data target tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu satker kurang memahami peraturan pengadaan BMN tanah/bangunan dan peraturan SBSK. Langkah yang diambil untuk meminimalisir hal tersebut yaitu bersurat kepada satker untuk menyampaikan target SBSK tahun 2024 agar satker dapat menyiapkan data perhitungan SBSK.

Rencana aksi dalam pencapaian target kedepannya yaitu melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, melakukan verifikasi data NUPBMN target yang telah diterima bersama dengan Kanwil DJKN Kalbar, serta melakukan monev terhadap progress penyelesaian pendataan dan perhitungan kesesuain penggunaan BMN dengan SBSK.

b. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

KPKNL Singkawang	2.Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2b-CP Tingkat Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target		45%	45%		45%	86,5%	86,5%	MAX/TLK
Realisasi		96,43%	96,43%		96,43%	119%	119%	
Capaian		214,29	214,29		214,29	137,57	137,57	
Nilai Kinerja		120	120		120	120	120	

KPKNL Singkawang	2.Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa				
	2b-CP Tingkat Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara				
	A. Jumlah Persetujuan/Penetapan Pengelolaan BMN yang ditindaklanjuti oleh satker K/L		B. Jumlah Persetujuan/Penetapan Pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang		
	Semester II 2023	Semester I 2024	Semester II 2023	Semester I 2024	
	27	18	27	18	

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset yaitu KPKNL Singkawang selalu memantau tindak lanjut atas persetujuan yang telah diterbitkan, mengingatkan satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan yang telah terbitkan.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2024 yaitu terdapat satker yang belum memahami peraturan terkait wasdal dan tindak lanjut persetujuan yang diterbitkan oleh pengelola barang. Untuk meminimalisir hal tersebut KPKNL Singkawang selalu memantau tindak lanjut atas persetujuan yang telah diterbitkan. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah akan segera melakukan wasdal pada satker yang belum melakukan pelaporan.

3. Sasaran strategis ketiga yaitu Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal

a. Persentase Realisasi Pokok lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Singkawang tahun 2024 adalah sebesar Rp73.000.000.000,00.

KPKNL Singkawang	3.Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal					
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	Rp14.600.000.000	Rp29.200.000.000	Rp29.200.000.000	Rp73.000.000.000	Rp73.000.000.000	MAX/ TLK
Realisasi	Rp7.246.643.189	Rp15.826.250.689	Rp15.826.250.689	Rp44.649.163.539	Rp44.649.163.539	
Capaian	49,65	54,2	46,2	61,16	61,16	
Nilai Kinerja	49,65	54,2	46,2	61,16	61,16	

Hal-hal yang telah diupayakan dalam mencapai realisasi tahun 2024 yaitu para Pejabat Fungsional Lelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku, sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang, melakukan penggalian potensi lelang, serta pelaksanaan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi ke sekolah maupun perguruan tinggi, serta *public campaign* kepada masyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu barang yang dilelang tidak *marketable*, daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah, beberapa objek lelang masih berpenghuni, harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi, serta minat dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang atas pelaksanaan lelang.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melaksanakan penggalian potensi lelang dan melakukan himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang dan mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku. Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas penggalian potensi lelang, mengirimkan surat himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang, melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam penyampaian sosialisasi maupun edukasi secara langsung kepada masyarakat.

b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

KPKNL Singkawang	3.Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal							
	3b-Cp Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	11,26%	54,79%	54,79%	81,13%	81,13%	120%	120%	
Capaian	113,39	182,63	182,63	135,22	135,22	120	120	
Nilai Kinerja	113,39	120	120	120	120	120	120	

K-Wide	3.Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal				
	3b-Cp Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				
	Target 2024	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20
Realisasi	Rp400.000.000	Rp45.047.430	Rp219.140.969	Rp324.512.657	Rp608.114.897

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) yaitu Angsuran, Penarikan/Pengembalian, Pelunasan, PSBDT, keringanan hutang terhadap BKPN yang sudah ditetapkan lunas pada tahun berjalan yaitu tahun 2024. Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang dan menerbitkan PSBDT bagi BKPN yang memenuhi persyaratan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu BKPN tidak disertai dengan barang jaminan, debitur menghilang/tidak diketahui keberadaannya; banyaknya *outstanding* piutang yang belum diselesaikan. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang agar menyerahkan BKPN yang telah macet dan melengkapinya dengan identitas dan data debitur yang jelas (penggalian potensi Piutang Negara).

Rencana aksi untuk pencapaian target ke depan yaitu melakukan penelitian lapangan terhadap keberadaan debitur, melakukan penagihan piutang negara dan menerbitkan PSBDT, berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang dan penyerahan baru, dan berkoordinasi dengan KPKNL Pontianak terkait penyerahan piutang dari satker di wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak.

4. **Sasaran strategis keempat yaitu Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien**

IKU pada sasaran strategis ini yaitu Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian.

KPKNL Singkawang	4. Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	MAX/ AVG
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi. Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku. Jangka waktu penyelesaian tersebut mengacu pada Kepdirjen Kekayaan Negara nomor 57/KN/2023, 58/KN/2023, 59/KN/2023, dan 69/KN/2023.

Hal yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu adanya sinergi, kolaborasi dan koordinasi yang sangat intens antar Fungsional Penilai Pemerintah dan juga pihak pemohon penilaian serta satker yang bersangkutan terkait dengan data-data pendukung pelaksanaan penilaian.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target IKU ini yaitu terbatasnya ketersediaan data pembanding yang sesuai di lapangan mengingat beragamnya jenis peruntukan atau penggunaan objek penilaian itu sendiri.

Untuk meminimalisir dan mitigasi risiko, Fungsional Penilai Pemerintah melakukan survei pendahuluan terhadap objek penilaian *via* internet (*maps*) untuk mengindentifikasi dan melakukan analisis pasar di sekitar lokasi objek penilaian. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pelaksanaan penilaian khususnya terkait dengan penelusuran data pembanding yang sesuai dengan objek penilaian.

Rencana aksi sebagai upaya peningkatan capaian IKU dimaksud yaitu adanya pembagian tugas penyelesaian laporan penilaian dalam internal Tim Penilai mengingat kompleksitas laporan penilaian beserta dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam laporan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, para Fungsional Penilai Pemerintah juga menyusun *database* terkait dengan data pembanding untuk memudahkan dan mempercepat dalam pelaksanaan proses penilaian.

5. Sasaran strategis kelima yaitu Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara Yang Efektif

a. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan dengan Realisasi

KPKNL Singkawang	5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/ AVG
Realisasi		80%	80%	113,33%	113,33%	120%	120%	
Capaian		200	200	188,88	188,88	120	120	
Nilai Kinerja		120	120	120	120	120	120	

KPKNL Singkawang	5. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif				
	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan				
T/R	Target 2024	Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4
Bidang Tanah	15		12	17	18

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban pada lingkup Kementerian Keuangan yaitu menyimpan asli

sertipikat, pemutakhiran data BMN yang akan disertipikatkan, permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN, dan pengalokasian anggaran sertifikasi.

Sertifikasi BMN berupa tanah sangat penting dilakukan. Ini menyangkut bukti legal atau alas hak kepemilikan dari tanah BMN tersebut. Oleh karena itu, KPKNL senantiasa berusaha untuk mengidentifikasi status kepemilikan dari BMN berupa tanah yang berada di dalam wilayah kerjanya. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah sampai dengan tahapan pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Hal yang mendukung tercapainya target yaitu aktif melakukan koordinasi dengan BPN tentang progres sertifikasi BMN. Namun terdapat beberapa kendala dalam pencapain target IKU ini yaitu Satker belum mengusulkan sertipikasi tanah, terdapat bidang tanah yang masih sengketa, masuk dalam kawasan hutan lindung dan bantaran sungai sehingga belum bisa diajukan sertipikasi. Untuk meminimalisir dan mitigasi risiko yang telah disusun untuk mengatasi kendala dan pencapaian target tersebut, yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap BMN berupa tanah pada satker. Rencana aksi untuk pencapaian target kedepan yaitu berkoordinasi dan bersurat kepada Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Singkawang terkait bidang tanah BMN yang menjadi target sertipikasi serta melakukan koordinasi dan rapat dengan satker dan Kantah yang bidang tanahnya menjadi target sertipikasi.

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

KPKNL Singkawang	5. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	5b.CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	12%	31%	31%	80%	80%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	25%	48%	48%	97%	97%	120%	120%	
Capaian	208,33	154,84	154,84	121,25	121,25	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

KPKNL Singkawang	5. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif				
	5b.CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)				
	Target 2024	Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4
Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya (80%)	40	10	19	36	48

Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker (20%)	8	2	4	10	14
Jumlah Rekomendasi/Jumlah Target Rekomendasi	48	12	23	46	62
Capaian IKU	100%	25%	48%	97%	120%

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan enam indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) melampaui target yang telah ditetapkan. Hal-hal yang mendukung tercapainya target yaitu koordinasi yang baik antara KPKNL dan BPS dalam hal permintaan data untuk pengisian *form* pada aplikasi portofolio. Namun terdapat beberapa data yang tidak tersedia di BPS sehingga pengisian data akan terhambat.

Langkah-langkah untuk memitigasi risiko untuk pencapaian target yaitu selalu berkoordinasi dengan BPS terkait permintaan data yang berhubungan dengan portofolio asset serta bersurat kepada satker untuk menyampaikan target Portofolio Aset tahun 2024. Untuk pencapaian target kedepan, KPKNL Singkawang akan melakukan survei lapangan serta melakukan perhitungan terhadap objek BMN yang pada Triwulan I 2025 menjadi target Portofolio Aset.

c. Pelaksanaan Inventarisasi BMN *Idle*

KPKNL Singkawang	5. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	5c-N Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target		55%	55%	88%	88%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian		181,82	181,82	113,64	113,64	100%	100%	
Nilai Kinerja		120	120	113,64	113,64	100%	100%	

Barang Milik Negara (BMN) *eks* BMN *idle* adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (BMN *idle*), yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN

eks BMN *Idle* di Pengelola Barang, Inventarisasi BMN *eks* BMN *Idle* merupakan kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan terhadap hasil pendataan BMN *eks* BMN *Idle* guna menghasilkan Daftar Barang Pengelola yang akuntabel dan akurat.

Parameter IKU ini diukur berdasarkan dua aspek, yaitu kemajuan kegiatan dan kecepatan pelaporan. Perhitungan tingkat kemajuan kegiatan berdasarkan hasil reviu/validasi dari unit di atasnya dengan indeksasi tahapan berupa persiapan inventarisasi, pelaksanaan inventarisasi, pelaporan Inventarisasi, dan tindak lanjut. Kecepatan pelaporan diukur dari waktu kepatuhan pelaporan.

Hal yang mendukung tercapainya target yaitu koordinasi antara kantor pusat dan KPKNL yang mengelola BMN *eks* BMN *idle*, sehingga pengusulan pengelolaan BMN *eks* BMN *idle* tahun 2024 segera dapat terselesaikan. Namun terdapat beberapa kendala dalam pencapain target IKU ini yaitu lokasi BMN *eks* BMN *idle* yang tidak strategis/tidak menarik bagi K/L secara umum, dimana terdapat beberapa tanah dan bangunan dalam kondisi rusak berat sehingga tidak layak untuk dikelola, baik untuk penggunaan, pemanfaatan, maupun untuk dipindahtangankan; serta K/L kesulitan dalam melakukan permohonan pengelolaan BMN *eks* BMN *idle* karena adanya peraturan bahwa permohonan tersebut harus disertai dengan kajian/analisis kebutuhan dan melalui RKBMN.

Untuk meminimalisir dan mitigasi risiko dilakukan beberapa hal yaitu penyesuaian target atas IKU dimaksud mempertimbangkan lokasi yang tidak menarik serta terdapat beberapa tanah dan bangunan dalam kondisi yang rusak. Selain itu, perhitungan IKU sebaiknya dihitung sejak BMN *eks* BMN *idle* tersebut diusulkan untuk dikelola, tidak sampai terbitnya surat persetujuan.

Rencana aksi yang dilakukan di tahun 2025 adalah berkoordinasi dengan Kantor Pusat terkait pengelolaan BMN *eks* BMN *idle* baik sebelum adanya permohonan maupun setelah adanya permohonan, berkoordinasi dengan satker K/L yang terindikasi mempunyai minat terhadap BMN *eks* BMN *Idle*, dan menawarkan BMN *eks* BMN *idle* kepada pemerintah desa/pemerintah daerah untuk mengelolanya baik melalui pemanfaatan maupun pemindahtanganan.

6. **Sasaran strategis keenam yaitu Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif**

a. **Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara**

KPKNL Singkawang	6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	96%	90,20%	90,20%	81%	81%	71%	71%	MIN/ TLK
Realisasi	92,16%	90,20%	90,20%	71,57%	71,57%	64,71%	64,71%	
Capaian	104	100	100	111,64	111,64	108,86	108,86	
Nilai Kinerja	104	100	100	111,64	111,64	108,86	108,86	

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKPN target adalah 30 BKPN selesai dari 102 BKPN sebagai saldo awal tahun 2024.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu melakukan penagihan piutang negara yang berpotensi untuk dapat diterbitkan SPPNL dan menerbitkan PSBDT bagi BKPN yang memenuhi persyaratan dilakukan PSBDT. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini yaitu rendahnya kualitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diterima oleh KPKNL Singkawang, umur piutang yang sudah lama dan keberadaan debitur yang tidak diketahui.

KPKNL Singkawang melakukan mitigasi risiko untuk mengurangi dan mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penelitian lapangan sekaligus penagihan langsung maupun melalui telepon terhadap debitur yang berpotensi lunas dan melakukan verifikasi terhadap BKPN lama dan menerbitkan PSBDT. Selain itu juga dengan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang dan penyerahan dengan memastikan kelengkapan data dan keberadaan debitur. Rencana aksi pencapaian target kedepannya yaitu melakukan penagihan piutang negara dan menerbitkan PSBDT serta berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang.

b. Persentase Produktivitas Lelang

KPKNL Singkawang	6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	MAX/ TLK
Realisasi	54,27%	55,32%	55,32%	98,38%	98,38%	120%	120%	
Capaian	180,9	122,93	122,93	163,97	163,97	134,83	134,83	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya IKU Persentase produktivitas lelang yaitu Para Pejabat Fungsional Pelelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku serta berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Kalbar terkait pengumuman lelang sehingga informasi pelaksanaan lelang pada KPKNL Singkawang dapat menjangkau lebih banyak peminat. KPKNL Singkawang juga melakukan pengumuman pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang pada hari-hari tertentu khususnya pada saat akan dilaksanakan lelang.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu barang yang dilelang tidak *marketable,* daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah, beberapa objek lelang masih berpenghuni, dan harga limit jauh lebih tinggi di atas harga likuidasi. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu berkoordinasi dengan *stakeholder* serta melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu melaksanakan penggalian potensi lelang dan melakukan himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang serta memberikan info pelaksanaan lelang melalui media sosial.

7. **Sasaran strategis ketujuh yaitu Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel Dan Profesional**

IKU sasaran strategis ini yaitu Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian.

KPKNL Singkawang	7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	7a.CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	MIN/ TLK
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian	200	200	200	200	200	200	200	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Hal yang mendukung dalam pencapaian target IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian salah satunya yaitu penggunaan data pembanding yang sesuai serta memberikan pemahaman/pengarahan secara informal kepada satker terkait tujuan strategis dari IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian dimaksud. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu data pembanding yang outlier, dan penetapan lebih tinggi dari pada nilai wajar hasil penilaian dikarenakan nilai limit yang diusulkan oleh pihak satker terlalu tinggi atau melebihi nilai wajar yang seharusnya. Jika nilai limit yang diusulkan pihak satker lebih tinggi dari nilai wajar hasil penilaian, maka yang

digunakan dalam penetapan/keputusan persetujuan pemindahtangan/pemanfaatan BMN adalah nilai usulan satker sehingga nilai wajar hasil penilaian tidak digunakan.

Langkah-langkah dan mitigasi risiko yang telah disusun untuk mengatasi kendala dan pencapaian target yaitu melakukan komunikasi dan memberikan pemahaman dengan pihak satker agar menyampaikan usulan harga didukung dengan data pembanding yang valid dan mengajukan usulan harga yang wajar pada saat melakukan permohonan persetujuan sewa. Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu KPKNL Singkawang berkoordinasi dengan pemohon terkait pengajuan usulan nilai limit.

8. **Sasaran strategis kedelapan yaitu Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif.**

a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

KPKNL Singkawang	8. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10,00%	60,00%	60,00%	80,00%	80,00%	90%	90%	MAX/ TLK
Realisasi	46,67%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	
Capaian	466,7	200	200	150	150	133,33	133,33	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

KPKNL Singkawang	8. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			
	8.a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai			
Uraian	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Bawahan yang memehuhi kriteria	18	18	20	20
Jumlah bawahan yang memehuhi kriteria	7	7	20	20
Bawahan yang telah melebihi kriteria	18	18	20	20
Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria	7	7	20	20
Nilai Komponen A (Kebintalan)	112	112	120	120

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul Dialog Kinerja Individu (DKI). Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pengukuran di lakukan dengan pemenuhan standar kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (Teknis/Manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2024.

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai dapat tercapai karena Subbagian Umum KPKNL Singkawang selalu menghimbau kepada para pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan kompetensinya dan bagian penempatan masing- masing pegawai. Selain itu kerjasama seluruh pegawai juga ikut mendukung tercapainya IKU ini. Kendala yang dihadapi yaitu terdapat beberapa pegawai yang belum mendapat panggilan diklat sesuai tusi pada waktu tertentu. Untuk memitigasi permasalahan yang ada Subbagian Umum mengajukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai melalui aplikasi diklat dan nota dinas ke Bagian Kepegawaian Kantor Pusat DJKN. Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah mengajukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai serta mendorong pegawai untuk mengikuti *e-learning* di Kemenkeu *Learning Center* (KLC).

b. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko

KPKNL Singkawang	8. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	8b-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target						85	85	MAX/TLK
Realisasi						98,5	98,5	
Capaian						115,88	115,88	
Nilai Kinerja						115,88	115,88	

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja dan manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan

telah menetapkan penggunaan metode *Balance Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko dilakukan, diperlukan pelaksanaan reviu atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Reviu pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

9. Sasaran strategis kesembilan yaitu Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

KPKNL Singkawang	9.Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	120%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	120	120	

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Hal yang mendukung pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yaitu karena masing-masing seksi telah mencapai target *output* yang telah ditetapkan, selain itu masing-masing seksi telah merealisasikan anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD). Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak permasalahan tersebut yaitu dengan mendorong masing-masing seksi untuk melaksanakan efisiensi pada masing-masing Rincian *Output* (RO), serta tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap konsistensi antara penyerapan anggaran dan rencana kegiatan.

Rencana aksi dalam pencapaian target kedepannya yaitu membuat rencana kerja tahunan dan melakukan mitigasi resiko berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, melakukan revisi anggaran dan penyesuaian RPD, kegiatan optimalisasi capaian *output* masing-masing seksi, dan kegiatan optimalisasi efisiensi anggaran.

b. Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

KPKNL Singkawang	9.Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	9b-CP Deviasi data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	MIN/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200	200	200	200	200	200	200	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425782 dan 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN diukur dari:

1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox (aplikasi lain khusus lelang) dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 5 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 10%. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%.

Permasalahan yang bisa terjadi pada pencapaian target IKU ini yaitu data PNBP pada Aplikasi OM SPAN belum terkini. Hal tersebut terjadi apabila terdapat setoran di akhir bulan berjalan (data akan termutakhirkan dengan sendirinya). Selain itu, permasalahan lain adalah tidak adanya alat sinkronisasi pada aplikasi pengelolaan PNBP yaitu antara OM SPAN, FocusPN dan Aplikasi *Dropbox* Lelang.

Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan rekonsiliasi atau pencocokan data PNBP dari FocusPN, *Dropbox* dan OM SPAN di akhir bulan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan petugas input *dropbox* lelang untuk segera mengisi *dropbox* apabila terdapat penyetoran PNBP.

Rencana aksi untuk tahun 2025 yaitu secara rutin melakukan pencocokan data PNBP dari *Focus*PN, Dropbox Lelang dan OMSPAN, melakukan koordinasi dengan petugas input *Dropbox* Lelang untuk segera mengisi *Dropbox* apabila telah dilakukan penyetoran PNBP, dan membuat pelaporan berkala setiap bulan. Hal-hal tersebut bisa menjadi mitigasi atas terjadinya deviasi data PNBP Fungsional DJKN.

10. Sasaran strategis kesepuluh yaitu Komunikasi Publik Yang Efektif

IKU sasaran strategis ini yaitu Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID).

KPKNL Singkawang	10. Komunikasi Publik Yang Efektif							
	10a-N Komunikasi Publik Yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	MAX/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh PPID Tingkat III adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik.

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi, Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Informasi Publik, serta capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website.

Permasalahan yang dapat terjadi pada pencapaian target IKU ini yaitu tidak tepat waktunya tanggapan/pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi dan pemutakhiran informasi pada website tidak sempurna. Upaya yang telah dilakukan untuk memitigasi terjadinya hal-hal tersebut antara lain yaitu berkoordinasi dengan petugas APT terkait penerimaan permintaan informasi publik dan memastikan pelaksananan pemutakhiran informasi pada website setiap triwulan.

Rencana aksi untuk tahun 2025 yaitu perlu dilakukan internalisasi terkait informasi publik guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai KPKNL Singkawang, untuk mengantisipasi adanya permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Singkawang. Pemutakhiran informasi pada website perlu dilakukan secara triwulanan dengan berpedoman pada ketentuan terkini. Selain itu, perlu dibuat lini waktu penyusunan laporan PPID agar laporan dapat disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

11. Sasaran strategis kesebelas yaitu Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah.

IKU sasaran strategis ini yaitu Indeks Efektivitas UKI.

KPKNL Singkawang	11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	11a-N Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target		15	15	20	20	82	82	MAX/ TLK
Realisasi		15	15	20	20	98,14	98,14	
Capaian		100	100	100	100	119,68	119,68	
Nilai Kinerja		100	100	100	100	119,68	119,68	

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan tiga komponen yaitu komponen pengungkit, komponen proses, dan komponen hasil.

Hal yang mendukung tercapainya target yaitu kualitas dokumentasi pengendalian internal dilihat dari aspek kelengkapan, kepatuhan penyampaian, dan kesesuaian format, penilaian kualitas dokumentasi dilakukan secara berjenjang. Nilai kualitas dokumentasi pada KPKNL ditentukan oleh Kantor Wilayah.

Permasalahan yang bisa terjadi pada pencapaian target IKU ini yaitu dokumen yang akan dinilai kurang lengkap atau penyampaian laporan tidak tepat waktu. Untuk meminimalisir dan mitigasi risiko, adalah dengan menyiapkan dokumen yang menjadi aspek penilaian adalah sebagai berikut: 1) Kontrak Kinerja; 2) Manual IKU; 3) Lembar penetapan manual IKU; 4) Matriks *Cascading*; 5) Dokumentasi Sosialisasi Kontrak Kinerja Kepala Kantor; 6) Dokumentasi Rapat Penyusunan Kontrak Kinerja; 7) Dokumentasi Dialog Kinerja Organisasi Triwulanan; 8) Dokumentasi sosialisasi, Edukasi, *Knowledge Sharing* Pengelolaan Kinerja; dan 9) *Leaflet*, Selebaran, Buletin di Bidang Pengelolaan Kinerja.

Rencana aksi untuk tahun 2025 yaitu perlu dilakukan internalisasi terkait penyusunan dokumen-dokumen penyusun indeks efektifitas UKI serta penyampaian laporan dengan tepat waktu.

B. KINERJA LAINNYA

Pada Tahun 2024, KPKNL Singkawang telah memperoleh berbagai penghargaan di antaranya yaitu:

1. Kinerja Terbaik Dengan Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2023 di lingkup Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat.
2. KPKNL Singkawang mendapatkan Penghargaan sebagai Satker Terbaik Keempat dalam Capaian Nilai IKPA Kategori Satker dengan Pagu DIPA sampai dengan 10 Miliyar Periode Triwulan IV Tahun 2023.
3. Capaian IKPA Terbaik II Satker Lingkup Kanwil DJPb Kalimantan Barat Semester I Tahun 2024.
4. Satuan Kerja Terbaik I dalam Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Kategori Pagu DIPA hingga Rp10 Miliar Tingkat KPPN Singkawang pada Triwulan I, II, dan III Tahun 2024.
5. Juara II Pengelolaan Arsip Unit Vertikal DJKN Tahun 2024.

Selain mencapai Sasaran Strategis, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima KPKNL Singkawang juga menghasilkan dan melanjutkan beberapa inovasi di tahun 2024 antara lain yaitu:

1. *Service Excellence*
   Peningkatan kualitas sarana prasarana dalam pemberian layanan di KPKNL Singkawang.
2. Kepatuhan Pelaporan Kinerja
   Untuk mewujudkan transparansi pelaporan kinerja, masing-masing seksi memberikan tanggapan atas Nota Dinas Seksi Kepatuhan Internal terkait permintaan data capaian kinerja. Tanggapan masing-masing seksi disampaikan kepada Seksi Kepatuhan Internal sebelum dilaksanakannya Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi.
3. *Xie Xie*
   KPKNL Singkawang menyampaikan pemberian apresiasi terhadap debitur piutang negara yang telah melakukan pembayaran angsuran piutang negara melalui KPKNL Singkawang. Pemberian apresiasi bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik dengan pihak eksternal dhi. debitur piutang negara.
4. Implementasi E-Meterai untuk efisiensi layanan
   Di tahun 2024, KPKNL Singkawang membuat inovasi dengan menerapkan e-meterai pada dokumen-dokumen yang sesuai dengan ketentuan berlaku perlu dibubuhkan meterai. Implementasi e-meterai ini digunakan pada layanan pasca lelang khususnya untuk dokumen berupa Kuitansi Pelunasan Pembayaran Lelang dan Salinan Risalah Lelang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan validitas *output*/dokumen

layanan pasca lelang dan memudahkan pengambilan layanan pasca lelang dimaksud.

5. *Knowing Your Employee*

   Kegiatan dialog antara atasan kerja dengan anggota tim, untuk membahas isu pekerjaan maupun personal. Melalui dialog yang dilaksanakan secara berkala, diharapkan dapat menjadi wadah untuk brainstorming terkait kendala/hambatan dan upaya yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.

6. TIDAYU, Tools Informasi Data Layanan Umum KPKNL Singkawang

   Melalui aplikasi ini seluruh pegawai dapat melakukan monitoring terhadap IKU pegawai, data status kehadiran, data monitoring pengembangan pegawai, data capaian *output*, data proyeksi penerapan anggaran, dan monitoring TURT.

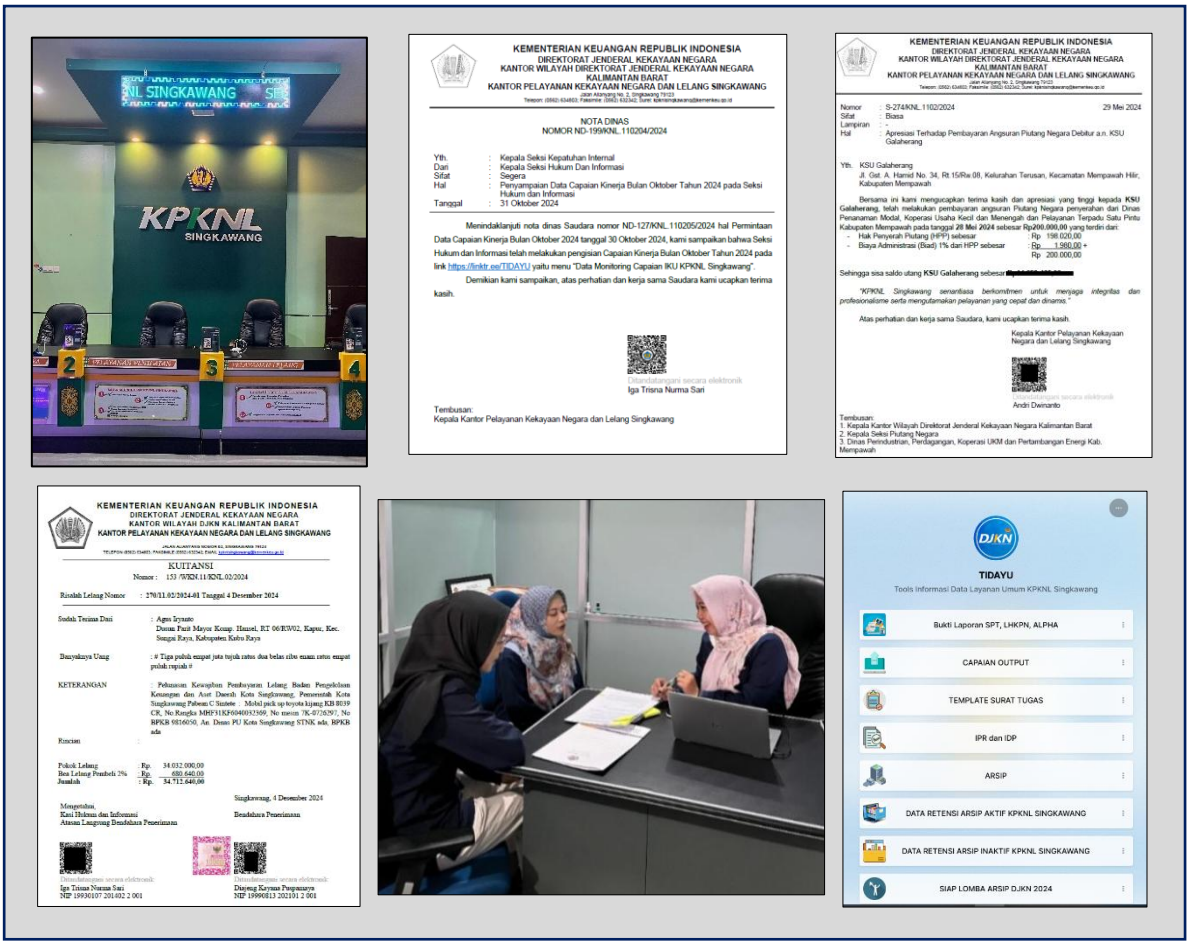

Gambar 5. Inovasi KPKNL Singkawang

KPKNL Singkawang juga turut aktif dalam membangun parameter *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dan berbagai kegiatan sosial lainnya melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai pihak diantaranya yaitu:

1. Internalisasi Pelayanan Prima dan Sosialisasi Pengarustamaan Gender (PUG) KPKNL Singkawang

   Kegiatan ini menjadi momentum berharga untuk mengingatkan betapa pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan responsif gender. Dengan adanya pengarustamaan gender, diharapkan seluruh pegawai dapat memahami peran dalam mendukung kesetaraan gender dan menciptakan layanan publik yang adil serta merata.

2. Lelang UMKM

   KPKNL Singkawang bekerja sama dengan UMKM melaksanakan lelang produk UMKM. Melalui pengenalan di portal lelang.go.id, para pelaku UMKM didorong untuk memasarkan dan mengenalkan produknya untuk mendapatkan harga yang kompetitif dengan jangkauan seluruh Indonesia.

3. Jalan Sehat Sekaligus *Public Campaign* Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi

   KPKNL Singkawang bersama Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan KPKNL Pontianak melaksanakan Jalan Sehat. Kegiatan ini sekaligus untuk menggelar *public campaign* bertema Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas!

4. Edukasi Pengelolaan Aset Negara dengan Menyelenggaakan DJKN *Goes to Campus* di IPDN Kampus Kalimantan Barat

   Kegiatan ini menjadi salah satu upaya KPKNL Singkawang untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, terutama kalangan akademisi, serta menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola aset negara yang profesional dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan edukasi ini, diharapkan generasi muda dapat terinspirasi untuk berkontribusi dalam menjaga aset negara dan turut serta dalam upaya membangun tata kelola keuangan yang transparan di Indonesia.

5. KPKNL Singkawang Bersama Kemenkeu Satu Singkawang, Pemkot Singkawang, dan Pemkab Sambas Memperingati HORI ke-78 dan HKN ke-18

   Sebagai wujud kepedulian, KPKNL Singkawang melaksanakan kegiatan bakti sosial ke salah satu Panti Asuhan yang berlokasi di Kota Singkawang. Selain itu, Bersama dengan Kemenkeu Satu Singkawang, Pemerintah Kota Singkawang, dan Pemerintah Kabupaten Sambas melaksanakan kegiatan berbagi sarapan pagi gratis, serta

pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai bentuk komunikasi keberadaan Kemenkeu Satu Singkawang di tengah masyarakat.

6. Kemenkeu Mengajar 9

   KPKNL Singkawang turut memeriahkan kegiatan Kemenkeu Mengajar 9 di Kota Singkawang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengelola keuangan negara, khususnya terkait APBN.

7. Pembinaan UMKM

   KPKNL Singkawang berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu Singkawang mengundang para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di area Kalimantan Barat. Kegiatan Pembinaan UMKM diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kapasitas para pelaku UMKM sekaligus penggalian potensi lelang dari sektor UMKM. Para pelaku UMKM diberikan pembekalan informasi mengenai lelang, aspek ekspor, perpajakan, serta pelaporan. Kegiatan pembinaan UMKM ini diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM, yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

8. Program Pengendalian Gratifikasi

   KPKNL Singkawang terus melakukan upaya pengendalian gratifikasi dan memasrikan bahwa setiap pejabat/pegawai KPKNL Singkawang harus selalu menjunjung nilai integritas dalam menjalankan tugas/fungsi KPKNL. Program dilaksanakan baik dengan kampanye di media sosial KPKNL Singkawang, nota dinas atau surat tertulis kepada *stakeholder,* dan kegiatan internal maupun dengan eksternal.

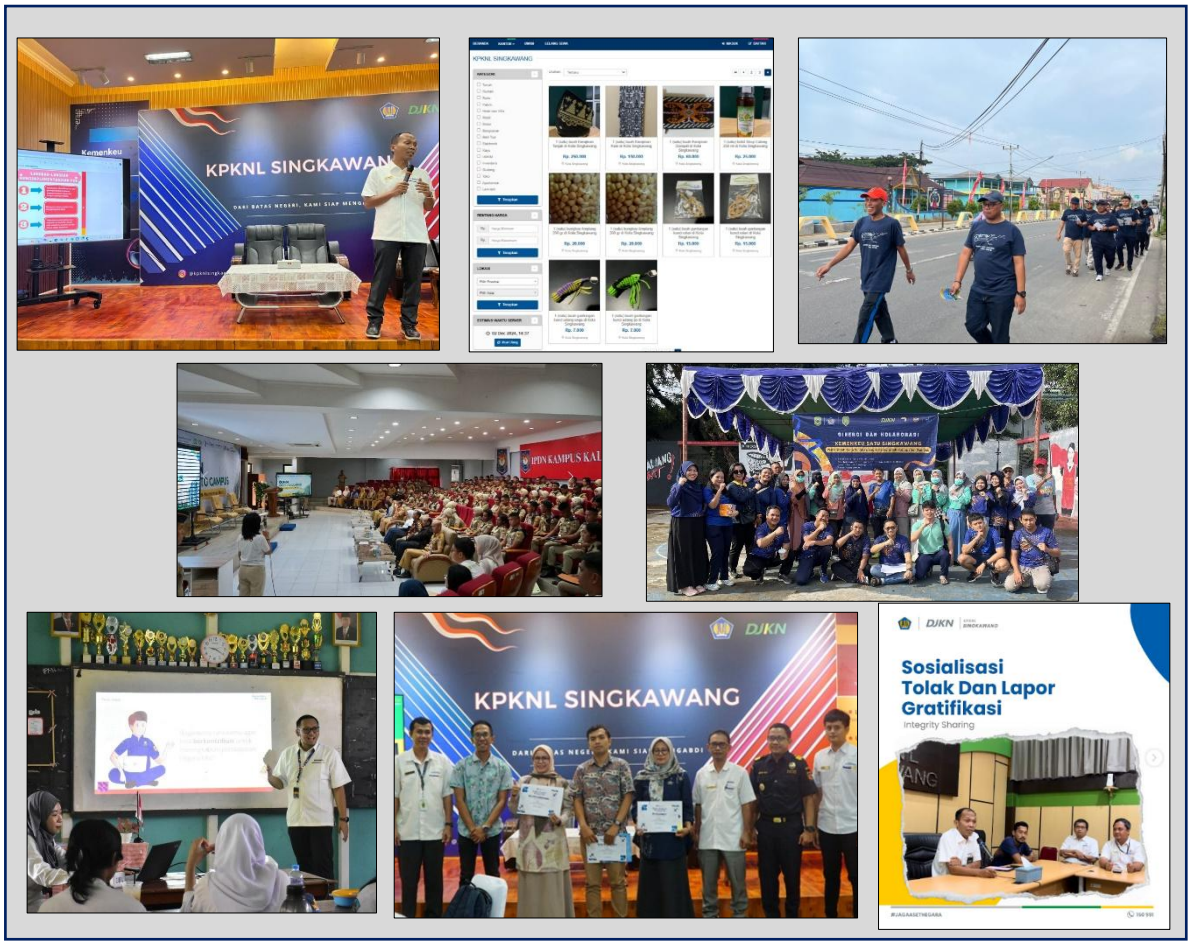

Gambar 6. Kegiatan Terkait GEDSI dan Lainnya

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Penyerapan anggaran KPKNL Singkawang tahun 2025, sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 96,62% dari total pagu anggaran sebesar Rp3.028.940.000 telah terealisasi sebesar Rp2.924.908.063. Dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu Akhir	Realisasi s.d Triwulan IV	Persentase
1.	Belanja Pegawai	0	0	0
2.	Belanja Barang	1.888.345.000	1.834.003.956	97,22%
3.	Belanja Modal	1.140.595.000	1.090.904.107	95,64%
Total		**3.028.940.000**	**2.924.908.063**	**96,62%**

Realisasi anggaran pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan tahun 2024, Hal tersebut dikarenakan di tahun 2025 terdapat belanja modal yang signifikan di tahun 2025. Realisasi Belanja Barang pada TA 2025 adalah sebesar Rp1.834.003.956, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.

No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Barang Operasional	636.577.528
2	Belanja Barang Non Operasional	69.601.317
3	Belanja Barang Persediaan	100.004.650
4	Belanja Jasa	121.332.216
5	Belanja Pemeliharaan	535.026.853
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	371.461.392
Jumlah		**1.834.003.956**

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 adalah sebesar Rp1.090.904.107, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	886.562.803
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.341.304
Jumlah		**1.090.904.107**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Singkawang merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Singkawang serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024. LAKIN ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan sebagian besar di antaranya nilai capaiannya di atas 100 persen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Singkawang tahun 2024 adalah sebesar 111,45% dalam kategori hijau.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan KPKNL Singkawang dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

a. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
b. Meningkatkan kesadaran (*awareness*), kemitraan dengan *stakeholder*, dan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
c. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara (termasuk aset *idle* dan pengurusan piutang negara) dan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik, dan hukum.
d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
e. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dan pengguna jasa KPKNL Singkawang.
f. Memprioritaskan penyelesaian piutang negara antara lain melakukan pemeriksaan harta kekayaan lain milik debitur, dan melakukan penagihan secara persuasif non-eksekusi agar debitur dapat menyelesaikan hutangnya.

g. Melanjutkan pelaksanaan penggalian potensi lelang baik melalui surat maupun kunjungan ke lapangan dan melakukan monitoring dan evaluasi lelang melalui peninjauan dan atau pengawasan langsung terhadap pelaksanaan lelang secara intensif.
h. Implementasi pengendalian intern oleh Unit Pelaksana Pengendalian dan Unit Pemantau Pengendalian Intern (UPPI) untuk menjamin pelaksanaan prosedur kerja penyelesaian permohonan layanan unggulan.
i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta peningkatan kenyamanan kantor dan Area Pelayanan Terpadu.
j. Merencanakan pengelolaan anggaran secara baik dengan memperhatikan penyerapan dan pencapaian *output* belanja.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan cermin keberhasilan kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2025 secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan secara eksternal LAKIN harus menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholder*s, sehingga pada akhirnya KPKNL Singkawang dapat semakin memberikan pelayanan optimal yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.